

**PERIODE SEMESTER II
TA 2022**

**Catatan atas
Laporan
Keuangan
Kantor Wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
Jawa Barat –
Ditjen PP
(40734)**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT
2022**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah,



R. ANDIKA DWI PRASETYA, Bc.I.P., S.Pd.
NIP. 196712171991031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	7
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	8
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	9
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	10
F. Pengungkapan Penting Lainnya	10
VI. Lampiran dan Daftar	46



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272
Telepon (022) 7272185 Faksimile (022) 7219273

Laman : <http://jabar.kemenkumham.go.id> Surel : kanwiljabar@kemenkumham.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah,



R. ANDIKA DWI PRASETYA, Bc.I.P., S.Pd.
NIP. 196712171991031002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester II Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp257.897.500 atau mencapai 99,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 258.000.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban sebesar Rp0 dan nilai Ekuitas sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp257.897.500 sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp257.897.500). Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) sebesar Rp0 dan Pos Luar Biasa Surplus/(Defisit) sebesar (Rp0) sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp257.897.500).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp0 ditambah Surplus/(Defisit)-LO

sebesar (Rp257.897.500).ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp257.897.500 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22		% thd Angg	31-Dec-21
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	-	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	-	0
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	-	0
Belanja Barang	B.4	258.000.000	257.897.500	99,96	257.169.550
Belanja Modal	B.5	0	0	-	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	-	0
JUMLAH BELANJA		258.000.000	257.897.500	99,96	257.169.550

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NERACA

PER 31 Desember 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.14	0	0
Peralatan dan Mesin	C.15	0	0
Gedung dan Bangunan	C.16	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.18	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	0
Aset Lain-Lain	C.22	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	0	0
JUMLAH EKUITAS		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0	0

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31/12/2022	31/12/2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	114.158.500	38.290.550
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	143.739.000	218.879.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		257.897.500	257.169.550
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-257.897.500	-257.169.550
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		-257.897.500	-257.169.550
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO	D.13	-257.897.500	-257.169.550

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-257.897.500	-257.169.550
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
JUMLAH		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	257.897.500	257.169.550
EKUITAS AKHIR	E.5	0	0

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Profil dan Kebijakan Teknis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah membawahi unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya dalam hal pengawasan dan jalur koordinasi.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** yang merupakan entitas pelaporan dari **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat**. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan **Kantor Wilayah Kementerian**

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan

penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup:
 - a) barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai dan barang tak habis pakai;
 - b) bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, contohnya bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan;
 - c) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan operasional.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian;

- b) Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode First In First Out (FIFO) bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO.

- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan

- c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset

Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer.	4
<i>Franchise</i> .	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat tidak mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat pelaksanaannya Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	323.000.000	258.000.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	323.000.000	258.000.000

Realisasi
Pendapatan
Rp0

Pendapatan

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Realisasi
Belanja Negara
Rp257.897.500

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp257.897.500 atau 99,96% dari anggaran belanja sebesar Rp258.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	258.000.000	257.897.500	99,96
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	258.000.000	257.897.500	99,96

Dibandingkan dengan Semester II TA 2021, Realisasi Belanja Semester II TA 2022 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 0,28%. Hal ini dikarenakan pagu anggaran 2022 sama jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	257.897.500	257.169.550	0,28
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	257.897.500	257.169.550	0,28

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	0	0	-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0	0	-
Belanja Uang Honor Tetap	0	0	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	-
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Jumlah	0	0	-

*Belanja Barang
Rp257.897.500*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp257.897.500 dan Rp257.169.550. Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2022 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar yaitu 0,28% dari Realisasi Belanja Barang 2021. Hal ini disebabkan oleh pagu anggaran 2022 sama jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	7.803.000	0	-
Belanja Bahan	72.500.500	30.630.550	136,69
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2.060.000	(100,00)
Belanja Sewa	0		-
Belanja Jasa Profesi	29.400.000	5.600.000	425,00
Belanja Jasa Lainnya	0		-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	4.455.000	0	-
Belanja Perjalanan Biasa	72.759.000	144.189.000	(49,54)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1.800.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0		-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70.980.000	72.890.000	(2,62)
Jumlah Belanja Kotor	257.897.500	257.169.550	0,28
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	257.897.500	257.169.550	0,28

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	0	0	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	0	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Semester II TA 2022 dan 2021*

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
PC	0	0	-
Printer	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	0	0	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester II TA 2022 dan 2021*

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Semester II TA 2022 dan 2021*

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	0	0	-
Belanja Modal Jaringan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II
TA 2022 dan 2021*

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
<i>Software Komputer</i>	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

a. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31/12/2022	31/12/2021
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Rekening	0	0
Jumlah	0	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Rekening	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan

setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Sept 2022	31 Des 2021
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Sept 2022	31 Des 2021
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	0
Jumlah	0	0

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per
31 Desember
2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Piutang Lancar	0	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021*

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Belanja Pegawai Dibayar di Muka	0	0
Belanja Barang yang Dibayar di Muka	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah

Rp0 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan

Rp0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Tagihan PA			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0

*Tanah
Rp0*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	0

*Peralatan dan
Mesin
Rp0*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Non Revaluasi	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pembangunan	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 0

Mutasi tambah:

Pembangunan Irigasi 0

Pembangunan Jaringan 0

Mutasi kurang:

Saldo per 31 Desember 2022 0

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022 0

Nilai Buku per 31 Desember 2022 0

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 0

Mutasi tambah:

Mutasi kurang:

Saldo per 31 Desember 2022 0

Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2022 0

Nilai Buku per 31 Desember 2022 0

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Tingkat Penyelesaian	Biaya Sudah Dibayar	Biaya Masih Harus Dibayar	Uang Muka	Retensi
-	-	-	-	-	-	-	-

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0 dan

Rp0

Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Irigasi	0	0	0
4	Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Aset Tak Berwujud

Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo ATB per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi ATB adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Aset Lain-Lain

Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per
31 Desember 2022*

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Aset Lain-lain			
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp45.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31

Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	-
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022

Uraian	30 Sept 2022	31 Des 2021
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	-	-
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp0

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP Rp0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL PENDAPATAN

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan PNBP Semester II TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan PNBP tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan PNBP Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban
Persediaan Rp0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Barang dan Jasa Rp0

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Pemeliharaan Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan Dinas Rp143,739,000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp143.739.000 dan Rp Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik/ (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	72.759.000	144.189.000	-49,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1.800.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70.980.000	72.890.000	-2,62
Jumlah	143.739.000	218.879.000	-34,33

Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2022 mengalami

(penurunan) sebesar 34,33%

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 0

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus/(Defisit)
LO
(Rp257.897.500)

D.13 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp257.897.500) dan (Rp257.169.550)

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp0*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus/(Defisit)
LO
(Rp257.897.500)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp257.897.500) dan (Rp257.169.550). Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas Rp0*

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/
Kesalahan
Mendasar Rp0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-
Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas Rp0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp257.897.500 dan Rp257.169.550. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas Semester II TA 2022

Uraian	2022
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	257.897.500
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	257.897.500

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, DDEL sebesar 0 sedangkan DKEL sebesar Rp257.897.500

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH

TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. REKENING YANG DIGUNAKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

Nomor Rekening : 8100204087341000

Nama Rekening : BPG 022 KEMENKUM BDG 408734

Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA

Surat Izin : S-3377/WPB.12/KP.05/2020

Tanggal : 04 Desember 2021

2. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W.11-13160.KU.03.03 Tahun 2022 Tanggal 01 Desember 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat Nomor : W.11-6632.KU.03.03 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

KPA : Sudjonggo

PPK : Toni Sugiarto

Bendahara : Irfan Zaelani

3. Di TA 2022 ini terdapat Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 (521131) dan (522192) dengan nilai total sebesar Rp12.258.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan SP2D Nomor : 220221701001047 tanggal SP2D 29 Desember 2022 dengan nilai Rp7.803.000,- berupa pembelian Masker, Madu, Hand Sanitizer, Multivitamin

Berdasarkan SP2D Nomor : 220221302004148 - tanggal SP2D 8 April 2022 dengan nilai Rp4.455.000,- berupa pembelian Swab Antigen Peserta Kegiatan Rakor Harmonisasi Perancangan Perda

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 08 **DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013080200KD **BA(013) ES1(08) JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 408734 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 13/01/23 3:50 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 13/01/23 3:32 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	114,158,500	38,290,550	75,867,950	198.138
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	143,739,000	218,879,000	(75,140,000)	(34.329)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 08 **DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013080200KD **BA(013) ES1(08) JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 408734 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 13/01/23 3:50 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 13/01/23 3:32 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	257,897,500	257,169,550	727,950	0.283
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(257,897,500)	(257,169,550)	(727,950)	0.283
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(257,897,500)	(257,169,550)	(727,950)	0.283
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(257,897,500)	(257,169,550)	(727,950)	0.283

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 08 **DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013080200KD BA(013) ES1(08) JAWA BARAT
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 408734 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**

Tgl Data : 13/01/23 3:33 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 13/01/23 3:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(257,897,500)	(257,169,550)	(727,950)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	257,897,500	257,169,550	727,950	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 08
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 408734
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BA(013) ES1(08) JAWA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/01/23 3:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
Tgl Data : 13/1/23 3:27 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	7,821,000	7,803,000	0	7,803,000	99.77	18,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	7,821,000	7,803,000	0	7,803,000	99.77	18,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	68,522,000	72,523,000	72,500,500	0	72,500,500	99.97	22,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	68,522,000	72,523,000	72,500,500	0	72,500,500	99.97	22,500
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	33,000,000	29,400,000	29,400,000	0	29,400,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12,276,000	4,455,000	4,455,000	0	4,455,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	45,276,000	33,855,000	33,855,000	0	33,855,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	133,727,000	72,821,000	72,759,000	0	72,759,000	99.91	62,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,075,000	70,980,000	70,980,000	0	70,980,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	209,202,000	143,801,000	143,739,000	0	143,739,000	99.96	62,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	323,000,000	258,000,000	257,897,500	0	257,897,500	99.96	102,500
	JUMLAH BELANJA	323,000,000	258,000,000	257,897,500	0	257,897,500	99.96	102,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 08
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG 408734

Waktu Olap: 2023-01-13 03:30:11.0 [B@4c47bb9e]
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 13/01/23 3:50 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	258,000,000	257,897,500	(102,500)	100	258,000,000	257,169,550	830,450	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 08
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 408734

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JAWA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 13/01/23 3:24 AM

Tgl. Cetak 13/01/2023 3:51 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	257,897,500
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,803,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	72,500,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	29,400,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,455,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	72,759,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70,980,000	0
JUMLAH			257,897,500	257,897,500

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 08
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 408734

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JAWA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 13/01/23 3:31 AM

Tgl. Cetak 13/01/2023 3:54 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	257,897,500
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,803,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	72,500,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	29,400,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,455,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	72,759,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70,980,000	0
JUMLAH			257,897,500	257,897,500

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KDUAPPAW : 013080200KD BA(013) ES1(08) JAWA BARAT
KODE SATKER : 408734 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 13/01/23 3:32 AM
Tgl. Cetak 13/01/2023 3:54 PM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 08
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 408734

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JAWA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl. Cetak 22/01/2023 9:44 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5